



BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

B. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana termuat dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tertuang dalam :

- a. Pasal 5 bahwa : Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Pasal 8 bahwa : Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi :
 - Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
 - Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
 - Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
 - Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

1. Bencana yang Terjadi dan Penanganannya

Pemberdayaan dan perlindungan masyarakat ditempuh dengan beberapa aktualisasi yang menyentuh kepentingan bersama. Gerak cepat dalam penanggulangan bencana alam dilakukan dalam upaya terbukanya akses ke daerah bencana dan tersalurkannya bantuan secara tepat sasaran.

Sepanjang triwulan I s/d triwulan IV tahun 2022, di wilayah Kabupaten Brebes telah terjadi bencana sebanyak 259 kali kejadian yang tersebar di beberapa kecamatan, meliputi:

- a. Banjir, sebanyak 76 kali kejadian dengan rincian : di Kecamatan Brebes sebanyak 14 kali kejadian, Kecamatan Wanasari 1 kali kejadian, Kecamatan Larangan 1 kali kejadian, Kecamatan Tanjung sebanyak 3 kali kejadian, Kecamatan Losari 14 kali kejadian, Kecamatan Jatibarang sebanyak 6 kali kejadian, Kecamatan Larangan sebanyak 5 kali kejadian, Kecamatan Ketanggungan sebanyak 9 kali kejadian, Kecamatan Tonjong 7 kali kejadian, Kecamatan Sirampog 1 kali kejadian, Kecamatan Bumiayu sebanyak 7 kali kejadian, Kecamatan Paguyangan 3 kali kejadian, dan Kecamatan Bantarkawung sebanyak 5 kali kejadian.

- b. Tanah longsor, sebanyak 130 kali kejadian dengan rincian : di Kecamatan Jatibarang 1 Kejadian, Kecamatan Larangan 1 kali kejadian, Kecamatan Ketanggungan sebanyak 2 kali kejadian, Kecamatan Banjarharjo sebanyak 4 kali kejadian, Kecamatan Tonjong sebanyak 6 kali kejadian, Kecamatan Sirampog sebanyak 30 kali kejadian, Kecamatan Bumiayu sebanyak 18 kali kejadian, Kecamatan Paguyangan sebanyak 29 kali kejadian, Kecamatan Bantarkawung sebanyak 27 kali kejadian, dan Kecamatan Salem sebanyak 12 kali kejadian.
- c. Tanah bergerak, sebanyak 5 kali kejadian dengan rincian : di Kecamatan Sirampog 4 kali kejadian dan Kecamatan Paguyangan 1 kali kejadian.
- d. Angin ribut, sebanyak 33 kali kejadian dengan rincian : di Kecamatan Brebes sebanyak 3 kali kejadian, Kecamatan Wanasari sebanyak 2 Kejadian, Kecamatan Losari 1 kali kejadian, Kecamatan Jatibarang sebanyak 1 kali kejadian, Kecamatan Larangan sebanyak 2 kali kejadian, Kecamatan Tonjong sebanyak 2 kali kejadian, Kecamatan Songgom 1 kali kejadian, Kecamatan Sirampog sebanyak 4 kali kejadian, Kecamatan Bumiayu sebanyak 5 kali kejadian, Kecamatan Paguyangan sebanyak 6 kali kejadian, Kecamatan Bantarkawung 1 kali kejadian, dan Kecamatan Salem sebanyak 5 kali kejadian.
- e. Bencana lainnya, sebanyak 15 kali kejadian, dengan rincian sebagai berikut :
di Kecamatan Bulakamba 1 kali kejadian, Kecamatan Tanjung 1 kali kejadian, Losari terjadi sebanyak 3 kali kejadian (laka air), Kecamatan Ketanggungan 1 kali kejadian (laka air), Kecamatan Tonjong 2 kali kejadian (pohon tumbang dan orang tercebur sumur), Kecamatan Songgom 1 kali kejadian (evakuasi orang hanyut yang disebabkan laka lintas), dan Kecamatan Bumiayu 4 kali kejadian (1 kejadian laka air dan 3 kejadian pohon tumbang), Kecamatan Paguyangan 2 kali kejadian (1 orang hilang dihutan saat berburu dan 1 orang hilang dihutan saat berkebun).

2. Status Bencana

Status bencana dari semua kejadian yang terjadi sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 adalah bencana lokal/kabupaten.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Brebes Tahun 2022 menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Brebes sejumlah Rp.8.170.228.186,- dengan rincian sebagai berikut :

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan BPBD (DPPA-SKPD) senilai Rp 6.791.807.886,-
- Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 1.378.420.300,-

REALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BELANJA TIDAK TERDUGA
 TAHUN ANGGARAN 2022
 OPD: BPBD KABUPATEN BREBES

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENGEMBA LIAN (Rp)	NOMOR / TGL SP2D
1	Desa Cenang, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes	Penanganan Bencana Angin Putting Beliung di Desa Cenang, Kecamatan songgom	14.476.000	6.980.000	7.496.000	03.06/04.0/0 00017/LS/5. 02.0.00.0.00. 2.0000/P.01/ 2/2022 tanggal 11 Februari 2022
2	Kabupaten Brebes	Pengadaan Logistik untuk percepatan Vaksinasi Covid- 19 Dosis ke-2 di Kabupaten Brebes	200.000.000	192.712.500	7.287.500	03.06/04.0/0 00051/LS/5. 02.0.00.0.00. 02.0000/P.01 /3/2022 tanggal 11 Maret 2022
3	Kecamatan Bumiayu dan Sirampog	Pengadaan Bronjong Penanganan Banjir Bandang di Kecamatan Bumiayu dan Kecamatan Sirampog	192.550.000	191.750.000	800.000	03.06/04.0/0 000104/LS/5 .02.0.00.0.00 .02.0000/P.0 1/4/2022 tanggal 4 April 2022
4	Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes	Pembuatan jembatan darurat penanganan bencana banjir di Desa Kamal, Kecamatan Larangan	179.541.500	157.987.500	21.554.000	03.06/04.0/0 00097/LS/5. 02.0.00.0.00. 02.0000/P.01 /4/2022 tanggal 04 April 2022
5	Desa Jemasih, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes	Pembuatan jalan darurat Penanganan Bencana Longsor di Desa Jemasi, Kecamatan Ketanggungan	7.163.000	5.950.000	1.213.000	03.06/04.0/0 0096/LS/5.0 2.0.00.0.00.0 2.0000/P.01/ 4/2022 tanggal 19 April 2022

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENGEMBA LIAN (Rp)	NOMOR / TGL SP2D
6	Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes	Bantuan Material perbaikan rumah yang terdampak bencana angin di kecamatan Paguyangan	47.109.000	46.732.600	376.400	03.06/04.0/0 00124/LS/5. 02.0.00.0.00. 02.0000/P.02 /4/2022 tanggal 19 April 2022
7	Desa Manggis Kecamatan Sirampog	Penanganan Darurat Bencana Longsor pada Jalan Kabupaten Ruas ManggisMlayang, Desa Manggis, Kecamatan Sirampog	48,940,000	17.300.000	31.640.000	03.06/04.0/0 00349/LS/5. 02.0.00.0.00. 02.0000/P.07 /10/2022 tanggal 25 Oktober 2022
8	Desa Randusanga Wetan Kecamatan Brebes	Pembuatan tanggul darurat menggunakan alat berat di Desa Randusanga Wetan, Kecamatan Brebes	69.800.000	58.700.000	11.100.000	03.06/04.0/0 00388/LS/5. 02.0.00.0.00. 02.0000/P.07 /11/2022 tanggal 22 November 2022
9	Desa Sridadi Kecamatan Sirampog	Pembuatan Huntara dan penanganan pengungsi akibat bencana Tanah Bergerak di Desa Sridadi, Kecamatan Sirampog	314.026.900	225.822.460	88.204.440	03.06/04.0/0 00349/LS/5. 02.0.00.0.00. 02.0000/P.07 /10/2022 tanggal 22 November 2022
10	Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang	Penanganan darurat pemberian bahan matrial untuk rumah terdampak bencana angin puting Beliung di Desa Kebogadung, Kecamatan Jatibarang	14.357.900	14357.900	0	03.06/04.0/0 00430/LS/5. 02.0.00.0.00. 02.0000/P.07 /12/2022 tanggal 09 Desember 2022

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENGEMBA LIAN (Rp)	NOMOR / TGL SP2D
11	Desa Losari Kidul Kecamatan Losari	Bantuan Perbaikan Rumah terdampak angin puting beliung di Desa Losari Kidul Kecamatan Losari	30.536.000	16.503.000	14.033.000	03.06/04.0/0 00479/LS/5. 02.0.00.0.00. 02.0000/P.07 /12/2022 tanggal 29 Desember 2022
12	Desa Cinanas Kecamatan Bantarkawung	Penanganan Darurat pembuatan talud pengaman jalan dan jembatan Kabupaten Desa Cinanas Kec. Bantarkawung	259.920.000	258.501.000	1.419.000	Dilaksanakan oleh DPU Kab. Brebes
	JUMLAH		1.378.420.300	1.193.296.960	185.123.340	

4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

- Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Menyusun regulasi penanggulangan bencana. Regulasi ini telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 4 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - b. Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Brebes dimana pembentukannya telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Brebes Nomor 360/575/Tahun 2022 Tanggal 18 April 2022 tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Brebes.
 - c. Membuat peta daerah rawan bencana untuk mengetahui potensi/ancaman bencana di wilayah Kabupaten Brebes, sehingga dapat digunakan dalam program pengurangan risiko bencana di Kabupaten Brebes.

- d. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui potensi bencana yang ada di wilayah tempat tinggalnya dan dapat melakukan langkah pencegahan terjadinya bencana.
- e. Menbentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai salah satu bentuk kegiatan pengurangan risiko bencana. Dengan adanya Destana diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana sesuai potensi bencana yang ada di wilayahnya secara mandiri dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, sistem peringatan dini (*early warning system*), relawan penanggulangan bencana, dan aparat desa yang terkoordinasi dengan Posko Induk BPBD Kabupaten Brebes.
- f. Memasang rambu-rambu jalur evakuasi di daerah rawan bencana.
- g. Melakukan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*) di daerah rawan bencana.
- h. Membersihkan saluran air dari sampah yang dapat menyumbat arus air.
- i. Mensosialisasikan nomor telepon darurat atau pos laporan darurat apabila terjadi bencana, sehingga informasi kebencanaan dapat segera diterima dan ditanggapi.
- j. Menyediakan peralatan penanggulangan bencana yang lengkap dan memadai.

5. OPD yang Menangani Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Brebes bertindak sebagai Koordinator penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan dibantu dinas teknis terkait. Dinas teknis yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain:

- a. Baperlitbangda.
- b. BPKAD.
- c. Dinas Pekerjaan Umum.
- d. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Tata Ruang.
- e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- f. Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah.
- g. Dinas Kesehatan.
- h. Dinas Sosial.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan yang Secara Khusus sebagai Petugas yang Menangani Bencana per 31 Desember 2022

a. P N S

NO	NAMA	PENDIDIKAN	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	Ir. Nushy Mansur, M.Sc	S-2 Master Of Science	Pembina Utama Muda – IV/c	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Brebes
2	Ruwanto, SH	S-1 Hukum	Pembina – IV/a	Sekretaris BPBD Kab. Brebes
3	Jubaidi, SH	S-1 Hukum	Pembina – IV/a	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4	Eddy Hidayat, S.Sos, MM	S2 Ekonomi, Magister Manajemen	Pembina – IV/a	Kabid Kedaruratan dan Logistik
5	Leo Alamudin, ST	S-1 Teknik Sipil	Pembina – IV/a	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6	Lully Yuliaty, SE, MM	S-2 Ekonomi, Magister Manajemen	Penata Tk.I – III/d	Kasubbag Program dan Pelaporan
7	Bahrn, SE	S-1 Ekonomi	Penata Muda Tk.I – III/b	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8	Sugeng Margianto, SE	S-1 Ekonomi	Penata Tk.I – III/d	Kasubbag Keuangan
9	Lukman Suyanto, SH	S-1 Ilmu Hukum	Penata Tk.I – III/d	Analisis Kebencanaan Ahli Muda
10	Sumitro Hadi Prayogo, ST	S-1 Teknik Sipil	Penata Tk.I – III/d	Analisis Kebencanaan Ahli Muda
11	Rismanto, ST	S-1 Teknik Sipil	Penata Tk.I – III/d	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda
12	Abdul Farid, SIP	S-1 Ilmu Pemerintahan	Penata Tk. I – III/d	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda
13	Wibowo Budi S, SE. ST	S-1 Teknik Sipil	Penata Tk. I – III/d	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda
14	Agung Kurniawan, ST	S-1 Teknik Geologi	Penata – III/c	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda
15	Ardiana Ubayani	SMA	Penata Muda Tk.I – III/b	Pengelola Keuangan
16	Sri Budiati, SE	S-1 Ekonomi	Penata Muda – III/a	Pengelola Barang Milik Negara

NO	NAMA	PENDIDIKAN	PANGKAT / GOL	JABATAN
17	Truli Satriyani, S.Ak	S-1 Akuntansi	Penata Muda – III/a	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
18	Rizkiyatul Khusna, SM	S-1 Manajemen	Penata Muda – III/a	Analisis Mitigasi Bencana
19	Tegar Naufal Prambudi, S.Sos	S-1 Sosial	Penata Muda – III/a	Penyuluh Bencana
20	Tanusi	SMA	Pengatur Tk I - II/d	Bendahara
21	Muh. Sa’dun Akbar, A.Md	D3 Manajemen Informatika	Pengatur – II/c	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana
22	Sunoto	SMA	Pengatur – II/c	Pengadministrasian Persuratan
23	Sutono	SMA	Pengatur Muda Tk.I - II/b	Pengemudi

b. Non PNS

1	Andika Yoga, S.Pd.	17	Irwan Reza Alfisahr, S.Kom
2	Budi Mualiman.	18	Annisa Ayu Fadillah, SM
3	Muhammad S Ardhillah	19	Siti Soraedah Rivani, S.Pd
4	Qomarudin	20	Budi Sujatmiko
5	Afda Alif	21	Abdul Basori
6	Beni Kuntoro, SE	22	Aji Supriyanto
7	Yuda Pratama, SE	23	Muhamad Hilal Hidayah
8	Faqih Abdul Jabar	24	Sri Lutfiani, SM
9	Lukman Hidayat	25	Devina Melinda Ulfa, A.Md
10	Ahmad Bahrudin	26	Shinta Ayu Maghfiroh, SP
11	Adi Purwandi	27	Nanda Fitri Riyantika, S.Ak
12	Minki Dwi Pangesti, SM	28	Maun
13	Akhmad Wahyudin	29	Adi Kusuma, ST
14	Angga Dwi Cahyo, A.Md	30	Ricky Sadat Wibowo
15	Mikiyal Hadoni, S.Kom	31	Zefri Nurochman
16	Mikiyal Hadoni, S.Kom	32	Khoirur Roziqin

7. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana

- Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Brebes membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Brebes, dengan dasar pembentukan : Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 09 Tahun 2011.

8. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Definisi bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor

alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana dapat terjadi setiap saat dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Kerugian akibat bencana tersebut dapat diminimalisir dengan cara menerapkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2021, Kabupaten Brebes termasuk daerah dengan risiko bencana yang tinggi. Hal ini sesuai dengan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang ada di wilayah Kabupaten Brebes. Kompleksitas dari permasalahan bencana memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan terpadu. Perencanaan penanganan bencana memerlukan pemetaan risiko bencana yang di dalamnya didahului dengan pemetaan kerawanan bencana di wilayah Kabupaten Brebes.

Dokumen Kajian Risiko Bencana tahun 2020-2024 yang disusun oleh BPBD Kabupaten Brebes menjelaskan tentang pemetaan risiko bencana di wilayah Kabupaten Brebes sebagai berikut :

a. Kawasan rawan bencana banjir

- Kelas risiko tinggi meliputi : Kecamatan Larangan, Losari, Tanjung, Kersana, Bulakamba, Wanasari, Songgom, Jatibarang, dan Brebes.
- Kelas risiko sedang meliputi : Kecamatan Bantarkawung, Bumiayu, Ketanggungan, dan Banjarharjo.
- Kelas risiko rendah meliputi : Kecamatan Salem, Paguyangan, Sirampog, dan Tonjong.

b. Kawasan rawan bencana tanah longsor

- Kelas risiko tinggi meliputi : Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Larangan, Ketanggungan, dan Banjarharjo.
- Kelas risiko rendah meliputi : Kecamatan Songgom.

- c. Kawasan rawan bencana gempa bumi
 - Kelas risiko sedang meliputi : Kecamatan Bumiayu, Tonjong, Ketanggungan, Banjarharjo, Losari, Kersana dan Songgom.
 - Kelas risiko rendah meliputi : Kecamatan Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Sirampog, Larangan, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, Jatibarang dan Brebes.
- d. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan
 - Kelas risiko tinggi meliputi : Kecamatan Losari.
 - Kelas risiko sedang meliputi : Kecamatan Banjarharjo.
 - Kelas risiko rendah meliputi : Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Larangan, dan Ketanggungan.
- e. Kawasan rawan bencana angin puting beliung
 - Kelas risiko tinggi meliputi : Kecamatan Losari.
 - Kelas risiko sedang meliputi : Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Larangan, Ketanggungan, Banjarharjo, Tanjung, Kersana, Bulakamba, Wanasari, Songgom, Jatibarang, dan Brebes.
- f. Kawasan rawan bencana kekeringan
 - Kelas risiko sedang meliputi : Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Larangan, Ketanggungan, Banjarharjo, Losari, Tanjung, Kersana, Bulakamba, Wanasari, Songgom, Jatibarang, dan Brebes.
- g. Kawasan rawan bencana erupsi Gunung Slamet
 - Kelas risiko rendah meliputi : Kecamatan Sirampog dan Paguyangan.
- h. Kawasan rawan bencana epidemi dan wabah penyakit.
 - Kelas risiko rendah meliputi : Kecamatan Salem, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Larangan, Ketanggungan, Banjarharjo, Losari, Tanjung, Kersana, Bulakamba, Wanasari, Songgom, dan Jatibarang.

- i. Kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi
 - Kelas risiko sedang meliputi : Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, dan Brebes.
- j. Kawasan rawan bencana kegagalan teknologi
 - Kelas risiko tinggi meliputi : Kecamatan Paguyangan, Bulakamba, Tanjung, Kersana, dan Ketanggungan.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, Januari 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES



Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 19641123 199503 1 001

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. Capaian Kinerja Utama

No	Indikator	Kondisi Awal 2017	Tahun/Realisasi				2022	
			2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi
1	Cakupan Desa Tangguh Bencana (%)	5	2,33	6,98	6,98	13,95	35	23,26
2	Pengurangan Persentase Korban Terdampak Bencana (%)	30	25	20	15	10	5	5,60
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	100	100	100	100	80	100
5	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tertangani Pasca Bencana (%)	15	20	25	30	35	40	66,59

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1). Cakupan Desa Tangguh Bencana (%).

Desa dan kelurahan di Kabupaten Brebes berjumlah 297 (292 desa dan 5 kelurahan). Desa risiko tinggi bencana banjir dan longsor berjumlah 285 desa. BPBD Kabupaten Brebes telah menetapkan skala prioritas pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), yaitu 15% dari 285 desa = 43 desa. Target pembentukan Destana tahun 2017-2022 adalah 43 desa.

Tahun 2017-2019 telah terbentuk 3 Destana atau 6,98%. Tahun 2017-2020 telah terbentuk 3 Destana atau 6,98%. Tahun 2017-2021 telah terbentuk 6 Destana atau 13,95%. Tahun 2017-2022 terbentuk 10 Destana atau 23,26%. Jika jumlah Destana yang

terbentuk dibandingkan dengan target, maka indikator kinerja Cakupan Desa Tangguh Bencana tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2017-2022. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran.

(2). Pengurangan persentase korban terdampak bencana (%).

Pengurangan persentase korban terdampak dapat diketahui dengan melihat penurunan jumlah korban tiap tahunnya.

(3). Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%).

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dihitung dengan menggunakan rumus jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dibandingkan dengan jumlah korban bencana keseluruhan. Selama tahun 2017-2022, persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebesar 100%. Ini berarti selama tahun 2017-2022, BPBD Kabupaten Brebes telah dapat menyalurkan bantuan sosial kepada semua korban bencana selama masa tanggap darurat.

(4). Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%).

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dihitung dengan menggunakan rumus jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dibandingkan dengan jumlah korban keseluruhan. Selama tahun 2017-2022, persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap sebesar 100%. Ini berarti selama tahun 2017-2022, BPBD Kabupaten Brebes telah dapat melakukan evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap kepada seluruh korban bencana.

(5). Persentase jumlah sarana dan prasarana yang tertangani pasca bencana.

Persentase jumlah sarana dan prasarana yang tertangani pasca bencana dapat dihitung dengan menggunakan rumus jumlah sarana prasarana yang tertangani pasca bencana dibandingkan dengan jumlah sarana prasarana yang memerlukan penanganan pasca bencana. Selama tahun 2017-2022, BPBD Kabupaten Brebes telah berupaya melakukan penanganan pasca bencana untuk setiap kejadian bencana.

2. Capaian Kinerja Program Pembangunan

No	Indikator	Kondisi Awal 2017	Tahun/Realisasi				2022	
			2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi
1	Cakupan Desa Tangguh Bencana (%)	5	2,33	6,98	6,98	13,95	35	23,26
2	Pengurangan Persentase Korban Terdampak Bencana (%)	30	25	20	15	10	5	5,60
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	100	100	100	100	80	100
5	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tertangani Pasca Bencana (%)	15	20	25	30	35	40	66,59

- Berbagai permasalahan yang dihadapi BPBD Kabupaten Brebes dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam penanggulangan bencana tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- a. Kabupaten Brebes memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang besar.
 - b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.
 - c. Kurangnya kolaborasi pentahelix (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa).
 - d. Adanya keterbatasan anggaran.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas, yaitu:

- a. Meningkatkan keterlibatan relawan dalam penanggulangan bencana, melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Relawan dan Pembinaan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana.
- b. Melakukan sosialisasi di daerah rawan bencana.
- c. Melakukan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di desa rawan bencana.
- d. Melakukan pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Brebes dimana pembentukannya telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Brebes Nomor 360/575/Tahun 2022 Tanggal 18 April 2022 tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Brebes.
- e. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana.
- f. Mengajukan permohonan tambahan anggaran kepada Bupati.
- g. Mengajukan permohonan anggaran dari APBD Provinsi.

Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 yang diturunkan dalam Rencana Kerja tahun 2022. Rencana Kerja tahun 2022 menjadi dasar untuk membuat Perjanjian Kinerja tahun 2022. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran Rencana Kerja dimana di dalam Perjanjian Kinerja memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dapat mendukung pencapaian target kinerja program OPD.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Brebes sudah sesuai dengan yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.1.Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 1.3.Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 2.1.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2.2.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 3.1.Sub Kegiatan Pengadaan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3.2.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 4.1.Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.
 - 4.2.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 4.3.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 4.4.Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 4.5.Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - 4.6.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 5.1.Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan.
 - 5.2.Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 6.1.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 6.2.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.
 - 6.3.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 7.1.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 7.2.Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 7.3.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penanggulangan Bencana

1. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
 - 1.1. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.
 - 1.2. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota.
 - 1.3. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 - 1.4. Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
 - 2.1. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota.
 - 2.2. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
 - 2.3. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - 3.1. Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Belanja		
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	6.791.807.886	6.554.813.303	96,51
Belanja Operasi	6.087.109.426	5.876.035.803	96,53
Belanja Modal	704.698.460	678.777.500	96,32
JUMLAH	6.791.807.886	6.554.813.303	96,51

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.543.390.301	4.307.246.489	96,51
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.850.900	57.145.361	98,78
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.724.000	29.393.561	98,89
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.576.900	12.518.300	99,53%
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.550.000	15.233.500	97,96
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.854.421.725	2.714.615.192	95,10
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.848.421.625	2.708.788.192	95,10
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.100	5.827.000	97,12
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.931.350	195.966.500	97,53
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.525.000	29.975.000	98,20
3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	170.406.350	165.991.500	97,41
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	506.376.866	449.649.653	88,80
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.343.100	5.338.500	99,91
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.429.000	31.013.500	98,68
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.945.000	12.224.000	94,43
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.154.000	29.128.800	99,91
4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.950.000	7.943.300	99,92

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	419.555.766	404.194.440	96,34
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	224.279.960	211.789.500	94,43
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.145.720	124.680.000	92,94
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.134.240	87.109.500	96,64
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.199.000	168.042.865	93,25
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.700.000	5.680.325	99,65
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	109.793.000	102.164.323	93,05
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.706.000	64.350.817	99,45
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.330.500	515.065.678	99,18
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.690.000	215.477.678	99,90
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.640.000	93.028.000	99,35
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	210.000.500	207.560.000	98,84
B	Program Penanggulangan Bencana	2.248.417.585	2.148.478.067	95,56
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	839.052.003	829.178.579	98,82
1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	181.606.500	178.956.000	98,54
1.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	355.209.688	353.223.437	99,44
1.3	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	49.755.100	47.936.000	96,34
1.4	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/kota	252.480.715	249.413.142	98,79
2	Pelayanan Penyelaman dan Evakuasi Korban Bencana	1.172.706.812	1.088.997.657	92,86
2.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	288.921.692	285.951.612	98,97
2.2	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	538.297.568	524.554.080	97,45
2.3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	345.487.552	326.856.965	94,61
3	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	236.658.770	230.301.831	97,31
3.1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	236.658.770	230.301.831	97,31

Program mencakup tujuan, manfaat, dan dampak serta kegiatan dan sub kegiatan, meliputi keluaran/hasil dari pelaksanaan kegiatan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Keluaran Kegiatan:

Jenis dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, serta laporan evaluasi/monitoring.

Hasil Kegiatan:

Tersusunnya dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, serta laporan evaluasi/monitoring.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- 2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Keluaran Kegiatan:

Jenis dokumen laporan keuangan akhir tahun.

Hasil Kegiatan:

Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
- 3.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Keluaran Kegiatan:

Jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah.

Hasil Kegiatan:

Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.
- 4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- 4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

- 4.5. Fasilitas Kunjungan Tamu.
- 4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Keluaran Kegiatan:

Jenis pelayanan administrasi umum perangkat daerah.

Hasil Kegiatan:

Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

- 5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan.
- 5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Keluaran Kegiatan:

Jumlah pengadaan barang milik daerah.

Hasil Kegiatan:

Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

- 6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- 6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.
- 6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Keluaran Kegiatan:

Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

Hasil Kegiatan:

Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

- 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Keluaran Kegiatan:

Jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

Hasil Kegiatan:

Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

II. Program Penanggulangan Bencana

1. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Sub Kegiatan:

- 1.1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.

1.2. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota.

1.3. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

1.4. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota.

Keluaran Kegiatan:

Jenis pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Hasil Kegiatan:

Meningkatnya pemahaman dan ketrampilan masyarakat tentang kebencanaan.

2. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub Kegiatan:

2.1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota.

2.2. Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

2.3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Keluaran Kegiatan:

Jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Hasil Kegiatan:

Terpenuhinya keamanan dan ketertiban masyarakat guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sub Kegiatan:

3.1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.

Keluaran Kegiatan:

Jumlah regulasi penanggulangan bencana.

Hasil Kegiatan:

Tersusunnya regulasi penanggulangan bencana.

Penghargaan yang didapat di tahun 2022 (tingkat provinsi atau tingkat nasional)

Selama tahun 2022, tidak ada penghargaan yang didapat oleh BPBD Kabupaten Brebes, baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

B. PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BREBES
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Kebijakan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Inovatif					
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia (%)	100%	100%	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis dokumen perencanaan perangkat daerah	5 jenis	5 jenis	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 jenis	5 jenis	
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah/monitoring	15 laporan	15 laporan	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan tersedia	100%	100%	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN dalam 12 bulan	20 orang	20 orang	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jenis dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 jenis	1 jenis	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pegawai	100%	100%	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	55 stel	55 stel	

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	57 orang	57 orang	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi umum kantor	100%	100%	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	8 jenis	8 jenis	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis alat tulis kantor tersedia	39 jenis	39 jenis	
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga tersedia	8 jenis	8 jenis	
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetak dan penggandaan tersedia	8 jenis	8 jenis	
4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jenis bahan makan minum tersedia	2 jenis	2 jenis	
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam daerah	100 laporan		
		Jumlah laporan perjalanan luar daerah	60 laporan		
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional kantor roda 2 (dua) yang dibeli	4 unit	4 unit	
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin lainnya	9 jenis	9 jenis	

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar terdistribusi	2000 buah	1017 buah	
		Jumlah surat masuk terdistribusi	1500 buah	1193 buah	
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jenis tagihan dibayar dalam 12 bulan	5 jenis	5 jenis	
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis alat/bahan untuk kegiatan kantor tersedia	22 jenis	22 jenis	
		Jenis bahan makanan minuman pegawai	2 jenis	2 jenis	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	100%	100%	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan dalam kondisi baik	31 unit	31 unit	
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	5 jenis	5 jenis	
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	1 unit	1 unit	

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase pengurangan korban terdampak bencana	5%	5.60%	
1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah relawan yang bersertifikat keahlian tanggap bencana	30 orang	30 orang	Permasalahan : Kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk melakukan upaya penanggulangan bencana secara mandiri. Solusi: Mengadakan kegiatan pelatihan dan mitigasi bencana kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada masyarakat tentang berbagai upaya mitigasi guna mengurangi risiko bencana di wilayahnya secara mandiri.
1.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah petugas piket posko kesiapsiagaan terhadap bencana	30 orang	30 orang	Permasalahan : Adanya keterbatasan anggaran menyebabkan pemasangan rambu jalur evakuasi hanya diperuntukkan 1 desa (1 desa mendapat 10 rambu jalur evakuasi).

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		Terpenuhinya rambu jalur evakuasi	10 buah	10 buah	Solusi : Mendorong penggunaan dana desa untuk pengadaan rambu jalur evakuasi. Hal ini diperlukan sebagai langkah pencegahan bencana.
1.3	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana)	1 desa	4 desa	Permasalahan : Adanya keterbatasan anggaran menyebabkan hanya ada 1 Desa Tangguh Bencana (Destana) yang dapat terbentuk melalui anggaran yang ada di DPA BPBD Kabupaten Brebes. Solusi: - Melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk pembentukan Destana. BPBD Provinsi memberikan anggaran untuk membentuk 2 Destana. - Mendorong penggunaan dana desa untuk pembentukan Destana. Terdapat 1 desa yang membentuk Destana dengan menggunakan dana desa.

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.4	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi perbaikan sarana dan prasarana	1 dokumen	1 dokumen	Permasalahan: Adanya refocusing anggaran menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan pelatihan JITUPASNA bagi petugas penilai kerusakan yang diakibatkan bencana. Solusi: Kegiatan penilaian kerusakan dilakukan oleh petugas yang tahun sebelumnya telah mendapat pelatihan JITUPASNA.
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	100%	
2.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SK Bupati mengenai status kebencanaan	12 buah	12 buah	Permasalahan: Wilayah Kabupaten Brebes memiliki risiko tinggi bencana. Adanya keterbatasan jumlah sumber daya manusia BPBD Kabupaten Brebes menyebabkan penanganan bencana menjadi kurang maksimal.

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
					Solusi: - Mendorong desa rawan tingkat tinggi untuk mengalokasikan anggaran kebencanaan pada Dana Desa dengan porsi memadai sehingga desa dapat melakukan penanganan awal jika terjadi bencana. - Melibatkan relawan dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana.
2.2	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah petugas piket posko bencana	4091 orang/hari	4091 orang/hari	Permasalahan: Wilayah Kabupaten Brebes memiliki risiko tinggi bencana. Adanya keterbatasan jumlah sumber daya manusia BPBD Kabupaten Brebes menyebabkan penanganan bencana menjadi kurang maksimal.
					Solusi: - Mendorong desa rawan tingkat tinggi untuk mengalokasikan anggaran kebencanaan pada Dana Desa dengan porsi memadai sehingga desa dapat melakukan penanganan awal jika terjadi bencana. - Melibatkan relawan dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana.

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
2.3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jenis paket logistik saat bencana	7 jenis	7 jenis	Permasalahan: - Adanya keterbatasan anggaran menyebabkan kebutuhan logistik penanganan bencana tidak dapat diakomodir seluruhnya dalam DPA BPBD Kabupaten Brebes. - Adanya keterbatasan peralatan kebencanaan yang dimiliki BPBD Kabupaten Brebes. - Harga peralatan kebencanaan yang relatif mahal sementara anggaran yang ada terbatas.
		Jenis peralatan saat bencana	6 jenis	6 jenis	Solusi: - Melakukan koordinasi dengan BNPB dan BPBD Provinsi Jateng untuk penyediaan logistik dan peralatan kebutuhan penanganan bencana
3	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase terwujudnya tata kelola penanggulangan bencana	100%	100%	
3.1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Peraturan daerah tentang penanggulangan bencana	1 dokumen	1 dokumen	

C. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN BREBES

No.	Rekomendasi DPRD Kab. Brebes atas LKPJ Bupati Brebes TA. 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	DPRD mendorong kepada Pemerintah Daerah kiranya anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan kebencanaan untuk dialokasikan yang memadai. Dengan harapan tanggap darurat manakala terjadi kebencanaan dapat diantisipasi sedini mungkin.	Sesuai amanat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 8 tertulis bahwa salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai. Penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yaitu: tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Menyadari akan pentingnya penanggulangan bencana, terutama untuk Kabupaten Brebes yang memiliki risiko tinggi bencana, maka dalam menyusun Renja setiap tahunnya, BPBD Kabupaten Brebes selalu mengusulkan anggaran sesuai kebutuhan (<i>money follow program</i>) dengan mengakomodir ke-3 tahapan penanggulangan bencana.	a. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 4 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Dengan adanya peraturan daerah tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten Brebes dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dalam hal penanggulangan bencana sehingga dapat meminimalisir korban/kerugian yang ditimbulkan akibat bencana. b. Terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Brebes. Dasar hukum pembentukannya adalah Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 360/575 tahun 2022 Tanggal 18 April 2022

No.	Rekomendasi DPRD Kab. Brebes atas LKPJ Bupati Brebes TA. 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
2	DPRD mendorong agar Dana Siap Pakai (DSP) bisa diterapkan di APBS Kabupaten Brebes, sehingga penanggulangan bencana bisa dilakukan lebih cepat.	Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana penanggulangan bencana tersebut berasal dari APBN, APBD, dan/atau masyarakat. Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN/APBD yang memadai dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk Dana Siap Pakai (DSP) . Pemerintah pusat menyediakan DSP dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat. Pemerintah daerah dapat menyediakan DSP dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD. Peraturan yang mendasari penggunaan DSP adalah Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai. Kemungkinan penerapan DSP di Kabupaten Brebes perlu dilakukan pengkajian yang mendalam, dalam hal ini dilakukan oleh TAPD Kabupaten Brebes.	c. Terbentuknya Tim Reaksi Cepat Kabupaten Brebes dengan dasar hukum pembentukannya adalah Surat keputusan Bupati Brebes Nomor 360/3692 Tahun 2022 Tanggal 14 November 2022 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Brebes. d. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Langkah-langkah tersebut di atas diharapkan dapat mengurangi risiko bencana.

No.	Rekomendasi DPRD Kab. Brebes atas LKPJ Bupati Brebes TA. 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
3	Masih kurang koordinasi antar SKPD terkait penanganan bencana.	Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penanggulangan bencana membutuhkan koordinasi lintas sektoral. Koordinasi menjadi kunci utama karena dapat mengurangi atau meminimalisir risiko terjadinya bencana. Mengingat pentingnya koordinasi antar OPD dalam penanggulangan bencana, maka BPBD Kabupaten Brebes selalu mengajak pihak-pihak terkait untuk bersama-sama terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Brebes.	
4	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana untuk petugas bencana.	Penanganan bencana memerlukan keterlibatan jumlah personil yang tidak sedikit. Keselamatan petugas penanganan bencana perlu diperhatikan. BPBD Kabupaten Brebes selalu mengupayakan untuk menjamin keselamatan petugas dalam penanganan bencana, salah satunya dengan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana.	

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES



Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19641123 199503 1 001